



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

**REKONSTRUKSI KONSEP AKUNTABILITAS ORGANISASI GEREJA:
(Studi Etnografi Kritis Inkulturatif pada Gereja Katolik di Tana Toraja)**

Fransiskus Randa¹

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Makassar

Abstract

This study aims to describe the practice of accountability that are understood by the stakeholders, explain the practice of accountability in several dimensions of accountability and to reconstruct accountability concept within the framework of the local culture. This study used an interpretive approach, ethnographic methods and informants of the people and Church officials. Data analysis was performed with a description, interpretation and reconstruction. Result description and meaning on the spiritual dimension was found that the meaning of spiritual accountability is conducted entirely by people with carrying out religious activities, give offerings as an expression of his faith and chose calls consecrated life. On the dimension of leadership found form of leadership that puts the accountability of service form. But on the other hand there is the paradox of ambivalent tendencies of centralized management of organizations to secure the teaching of Christology and ignore the dimension that puts participation of members elements and the involvement of the people. Meanwhile, on the dimensions of ecclesiastical property management at every level in the organization of the Catholic Church indicates not maximized, giving rise to the practice of dishonesty in preparing the report.. This was caused by too much authority in the hands of the leaders of the Church organization and lack of role of the Board of Finance.. At the reconstruction stage the concept of accountability, reconstruction is done by placing the Church as a tongkonan, where members (toma'rapu) bonded inner and outer building as tongkonan Christ Church on the third dimension of accountability. The implication of this study is to confirm the results of previous research that the organization of the Catholic Church including the expressive organizations against the practice of accountability because of the domination of power by its leaders. On the other hand the reconstruction of the concept of accountability in the local culture as Tongkonan acculturative Christ can be developed in building the local church organizations more accountable.

Kata Kunci: akuntabilitas, inkulturasi, Gereja, spiritual, kepemimpinan, harta benda Gerejawi, tongkonan,

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian

Desakan dari para *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi dan rasa keadilan di dalam setiap organisasi merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder*. Dalam seminar akuntabilitas

¹ Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., MEc., PhD.; Dr. Unti Ludigdo, SE., Ak., MSi dan Prof. Eko Ganis S.SE.,MCom(Hons), PhD (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) atas arahan beliau dalam pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian ini.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

ORNOP² menyimpulkan bahwa akuntabilitas kepada *stakeholder* menjadi kebutuhan bagi setiap ORNOP jika ingin tetap mendapat kepercayaan dari mitranya.

Organisasi Gereja pada umumnya dan Gereja Katolik pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non pemerintah pada bidang keagamaan, juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan agar Gereja terbuka dan melaksanakan praktik akuntabilitas. Selama ini organisasi Gereja Katolik dianggap tidak transparan dan tertutup terhadap praktik manajemen modern. Menurut Berry (2005), organisasi Gereja resisten terhadap praktik akuntabilitas karena kuatnya pengaruh para pemimpin dan tradisi dalam organisasi Gereja. Kondisi tersebut menyebabkan kasus-kasus penyelewengan dalam Gereja Katolik tidak banyak diketahui dan cenderung ditutup rapat-rapat agar tidak menjadi konsumsi publik (Rahardi, 2007). Dengan demikian menarik untuk dikaji guna membuka selubung praktik akuntabilitas dalam Gereja Katolik.

Akuntabilitas bagi setiap organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik non pemerintah termasuk organisasi Gereja sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Gray *et al.* (2006) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 1999, 2005), namun dalam praktiknya di *Non Government Organization* (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001).

Penelitian akuntansi dan akuntabilitas dalam NGO Gereja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti: Laughlin (1988 & 1990), Booth (1993), Duncan *et al.* (1999), Lightbody (2000 & 2001), Jacobs & Walker (2000), Duncan & Flesher (2002) dan Berry (2005). Penelitian secara khusus tentang akuntabilitas spiritual dalam Gereja khususnya dalam Gereja Protestan dilakukan oleh Jacobs dan Walker (2000) yang meneliti praktik akuntabilitas di lingkungan Gereja komunitas IONA³ dan Saerang (2001) yang meneliti komunitas Gereja Pentakosta di Indonesia. Penelitian Jacobs dan Walker (2000) menemukan kegiatan keseharian komunitas IONA ditentukan oleh aturan kristiani.

² Seminar tentang akuntabilitas ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang diselenggarakan oleh LSM SMERU bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Jakarta dan Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

³ IONA merupakan komunitas Gereja Protestan di Inggris yang didirikan pada tahun 1938.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kegiatan sehari-hari organisasi Gereja seperti penerimaan dan penggunaan dana sumbangan dan operasional dicatat dan setiap anggota berhak meminta penjelasan atas akun-akun tersebut. Sedang penelitian Saerang (2001) menemukan bahwa akuntabilitas dalam Gereja Pentakosta beragam dari yang sifatnya komunal hingga yang bersifat terikat. Dana yang diterima dari umat yang bersifat komunal tidak perlu menggunakan sistem informasi akuntansi karena sangat sederhana seperti dana persembahan dan sumbangan. Sedang untuk level organisasi Gereja sangat diperlukan seperti Dewan Gereja pada tingkat pusat dan regional. Akuntabilitas dari kedua hasil riset ini merupakan bentuk refleksi spiritual antara agama dan pembukuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ini didasari filosofi yang menyatakan hubungan antara Tuhan dan manusia merupakan hubungan pribadi yang dipraktikkan dalam bentuk akuntabilitas yang meliputi aspek spiritual, sosial dan keuangan oleh para anggota jemaat dan pimpinan Gereja lewat perilaku mereka setiap hari.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi Gereja lebih banyak ditentukan oleh para pemimpin Gereja yang cenderung untuk menolak praktik akuntabilitas (Booth, 1993 dan Lightbody, 2001). Pada sisi lain organisasi Gereja memiliki praktik-praktik yang telah lama dijalankan sehingga sulit untuk menerima perubahan secara langsung (Berry, 2005). Penelitian-penelitian tersebut juga sebagian besar dilakukan pada organisasi Gereja Protestan yang mempunyai karakteristik pada otoritas masing-masing Gereja lokal dalam mengelola organisasi. Penelitian dalam organisasi Gereja Katolik relatif kurang dilaksanakan karena organisasi Gereja Katolik lebih tertutup dan sangat hirarkis, sehingga praktik akuntabilitas dalam organisasi tersebut tidak banyak diketahui oleh publik.

Pada sisi pelestarian budaya lokal, aspek karya pewartaan Gereja Katolik juga mendapat kecaman bahwa proses pewartaan karya keselamatan yang dilakukan bersamaan dengan imperialisme dan kolonialisasi kepada bangsa lain telah menyebabkan hancurnya budaya lokal. Budaya Eropa yang melekat pada para misionaris turut menjajah budaya lokal sehingga banyak yang punah dan tak terselamatkan. Gereja Katolik kurang peka akan perlunya penghargaan terhadap apa yang baik, luhur dan suci yang terdapat dalam budaya dan agama-agama lain. Setelah Konsili Vatikan II (1962-1965) Gereja Katolik mulai



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

menaruh perhatian pada konsep inkulturasi. Bahkan dalam dokumen resmi Gereja disebutkan bahwa inkulturasi adalah suatu transformasi nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam melalui proses integrasi mereka ke dalam kekristenan dan meresapkan kekristenan ke dalam pelbagai kebudayaan umat manusia (RM 52)⁴.

Memahami proses inkulturasi budaya pada aspek spiritual dan tata kelola organisasi Gereja Katolik menjadi penting karena nilai-nilai budaya lokal kaya akan makna yang dapat mendukung pencapaian akuntabilitas gereja secara menyeluruh. Nilai-nilai budaya lokal dapat diserap dalam organisasi Gereja Katolik sehingga organisasi Gereja Katolik dapat berkembang menjadi Gereja Katolik yang membudaya dalam aspek religius dan tata kelola organisasi yang lebih transparan, kontekstual dan akuntabel.

Sejalan dengan Konsili Vatikan II yang juga menegaskan pentingnya inkulturasi budaya agar Gereja Katolik dapat melepaskan diri dari tuduhan pemusnah budaya lokal, meningkatkan karya pewartaan yang berterima baik oleh masyarakat lokal, dan meningkatkan akuntabilitas organisasi Gereja, maka dibutuhkan hasil kajian yang mendalam tentang praktik akuntabilitas dalam organisasi Gereja. Hasil pemaknaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi inkulturatif nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat lokal. Guna mendukung tujuan tersebut, peneliti memilih objek penelitian pada organisasi Gereja Katolik yang hidup dalam pengaruh budaya lokal yang masih tetap eksis.

Berdasarkan obyek penelitian dan konsep inkulturasi budaya yang dihasilkan Konsili Vatikan II, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal: Pertama, penelitian ini dilakukan pada Gereja Katolik yang mempunyai struktur organisasi yang sentralistik sedang penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan pada Gereja Protestan yang mempunyai otonomi masing-masing Gereja (Laughlin, 1988 & 1990; Booth, 1993, Lightbody, 2000 & 2001; Jakob & Walker, 2000; Berry, 2005). Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan metode etnografi yang dapat mengangkat secara natural praktik akuntabilitas apa adanya dalam suatu daerah atau organisasi. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada Gereja Katolik tradisional yang hidup dalam pengaruh kekuatan nilai-nilai budaya lokal yang masih eksis sedang penelitian sebelumnya lebih

⁴ Surat Himbuan Apostolik Paus Yohanes Paulus II, *Redemptoris Missio* (RM), tugas Perutusan Sang Penebus, Roma, 7 Desember 1990.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

banyak dilakukan pada organisasi Gereja yang sudah maju (Booth,1993; Lightbody, 2000 & 2001). Keempat, penelitian ini mengkonstruksi konsep akuntabilitas atas dasar nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari proses inkulturasi budaya ke dalam organisasi Gereja.

Pemilihan obyek penelitian Gereja Katolik di Tana Toraja didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: (1) Masyarakat Toraja sebagian besar beragama Kristen yaitu Protestan dan Katolik. (2) Umat Gereja Katolik tempat meneliti sebagian besar tinggal di pedesaan sehingga diharapkan dapat memberikan pemaknaan tentang akuntabilitas lebih natural dan apa adanya. (3) Gereja Katolik di Tana Toraja hidup dalam pengaruh kekuatan budaya lokal yang masih tetap eksis sehingga memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi inkulturatif konsep akuntabilitas dari nilai-nilai budaya lokal.

Penelitian ini dilakukan dengan observasi yaitu peneliti menjadi bagian dari komunitas masyarakat lokal, melakukan wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para informan dan mengamati aktivitas umat dan para pemimpin Gereja lebih dekat. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran dan pemaknaan tentang praktik akuntabilitas yang dilaksanakan organisasi Gereja secara mendalam dan apa adanya. Di samping itu dengan observasi tersebut, peneliti juga dapat mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi inkulturatif.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk melakukan pemaknaan akuntabilitas yang ada dalam organisasi Gereja dan melakukan rekonstruksi inkulturatif nilai-nilai budaya lokal yang menjadi amanah Konsili Vatikan II. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah praktik akuntabilitas organisasi Gereja Katolik lokal, sehingga masalah penelitian dapat dirumuskan:

- a. Bagaimana pemaknaan akuntabilitas dalam organisasi Gereja Katolik lokal?
- b. Bagaimana rekonstruksi konsep akuntabilitas organisasi Gereja Katolik yang terinkulturasi nilai budaya lokal?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan memaknai praktik akuntabilitas organisasi Gereja Katolik lokal dan merekonstruksi konsep akuntabilitas dari hasil inkulturasi nilai budaya lokal.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dalam merumuskan model dan konsep akuntabilitas pada organisasi *non profit* lembaga keagamaan pada umumnya dan organisasi Gereja pada khususnya. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi praktik dalam hal pelaksanaan akuntabilitas organisasi Gereja yang sejalan dengan tujuan utama organisasi Gereja yang membawa keselamatan bagi pengikutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi keuskupan, paroki dan stasi dalam merumuskan sistem dan mekanisme tata kelola sumber daya organisasi.

1. PARADIGMA INTERPRETIF DALAM PENELITIAN BUDAYA

Memilih paradigma interpretif dalam penelitian ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa paradigma interpretif bertujuan untuk memahami (*to understand*) dan untuk menginterpretasi (*to interpret*) sehingga tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami praktik akuntabilitas dalam suatu masyarakat atau organisasi dapat dicapai. Hal itu dapat dicapai karena paradigma interpretif mengedepankan interpretasi sang peneliti tentang suatu realitas sosial sehingga hasil yang dicapai lebih mendalam dan sang peneliti memiliki ruang yang lebar untuk menginterpretasi suatu obyek yang diteliti.

Etnografi sebagai Metode Penelitian

Etnografi meskipun pada awalnya merupakan metode yang digunakan oleh antropologi yang terfokus pada pendeskripsian suatu budaya masyarakat primitif, namun dalam perkembangannya tidak lagi terbatas pada upaya mengungkap budaya masa lalu kelompok suku tertentu pada suatu wilayah tetapi berkembang masuk dalam bidang sosiologi dan dapat mengungkap kehidupan sosial masa kini (Molinowski dalam Spradley, 1997). Etnografi baru ini kemudian berkembang dan disebut etnografi aliran antropologi kognitif dan oleh Spradley dan teman-temannya kemudian mengembangkan pendekatan baru tersebut yang disebut generasi antropologi kognitif kedua.

Spradley (1997: 5) mendefinisikan ulang kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar untuk menginterpretasikan dan menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling. Dengan demikian obyek kajian antropologi bukanlah fenomena materiil saja, tetapi juga tentang cara fenomena tersebut



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

diorganisasikan dalam pikiran (*mind*) manusia. Tugas etnografi adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut termasuk pikiran sang peneliti.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam hal ini adalah observasi partisipasi dan wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, bukan kunjungan singkat dengan daftar pertanyaan yang terstruktur seperti pada kunjungan survei (Spradley, 1997: 157). Meskipun demikian yang dimaksud dengan etnografi tidak saja bagaimana mengumpulkan data, tapi juga bagaimana menuliskan pemahaman atas apa yang diteliti dan merupakan gabungan tindakan antara peneliti maupun inti dari penelitian tersebut. Ciri-ciri khas dari penelitian lapangan etnografi yang merupakan komponen dari antropologi adalah *natural culture, integrative holism, in-depth studies analysis and chronology* (Sarantakos, 1993; 264).

Metode etnografi telah mengikuti perkembangan yang pesat seiring dengan semakin kompleksnya realitas sosial dan budaya masyarakat. Penelitian tentang realitas sosial dan budaya tidak cukup dengan deskripsi saja tetapi lebih dari pada itu bahwa peneliti dapat memaknai, mengkritisi dan mendekonstruksi agar dapat memecahkan persoalan-persoalan sosial dan budaya yang terus berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Perkembangan tersebut membawa metode etnografi terus berkembang pula seiring dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua bentuk metode etnografi yaitu metode alur maju bertahap dan metode etnografi kritis inkulturatif. Metode alur maju bertahap dari Spradley digunakan untuk analisis deskripsi dan pemaknaan praktik akuntabilitas sedang metode etnografi kritis inkulturatif (*acculturative critical ethnographic method*) digunakan untuk merekonstruksi konsep akuntabilitas.

Etnografi Alur Penelitian Maju Bertahap

Metode etnografi Alur Penelitian Maju Bertahap (*Developmental Research Sequence*) mempunyai lima prinsip utama yaitu; memilih teknik penelitian, mengidentifikasi tahapan-tahapan penelitian, menjalankan tahapan-tahapan secara berurut, mempraktikkan dalam penelitian secara orisinil dan menemukan *problem solving* yaitu bahwa hasil penelitian mempunyai manfaat praktis (Spradley, 1997; 55).



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kelima prinsip penelitian etnografi tersebut oleh Spradley (1997; 59) dibagi menjadi dua belas langkah yaitu memilih informan, mewawancarai seorang informan, membuat catatan etnografis yang akan menjadi bahan analisis lebih lanjut, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis wawancara, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema budaya, dan membuat sebuah etnografi. Dalam penelitian ini kedua belas tahapan tersebut tidak semuanya digunakan sehingga tahapan-tahapan yang dipilih bergantung pada ketersediaan dan ketermaknaan informasi, artefak dan data lainnya yang dibutuhkan.

Penggunaan metode ini kemudian hanya mampu memberikan deskripsi dan pemaknaan terhadap realitas praktik akuntabilitas pada tingkatan organisasi Gereja Katolik baik pada Gereja stasi, paroki maupun keuskupan yang menjadi domain paradigma interpretif. Untuk itu dibutuhkan ekstensi metode etnografi dalam paradigma kritis agar sampai pada tahap analisis rekonstruksi konsep akuntabilitas.

Etnografi Kritis Inkulturatif (*Acculturative Critical Ethnographic*)

Peningkatan kegunaan metode etnografi yang terus berkembang, kemudian tidak hanya terbatas dalam paradigma interpretif tetapi mulai masuk dalam paradigma kritis yang berkembang sejalan dengan semakin kompleksnya masalah sosial dan budaya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Keinginan untuk mendobrak tatanan sosial kemasyarakatan dan budaya tertentu dengan adanya interaksi antar individu atau antar kelompok menggerakkan studi etnografi juga berkembang sejalan dengan paradigma kritis yang disebut metode etnografi kritis. Seperti diungkapkan Sarantakos (1995; 266) etnografi kritis dapat menganalisis hubungan antara praktik sosial dengan praktik budaya secara makro, yang bertujuan untuk emansipasi, pemberdayaan dan pembebasan.

Dengan nilai pemberdayaan dan pembebasan tersebut, maka rekonstruksi dalam penelitian ini menekankan pada rekonstruksi inkulturatif. Rekonstruksi inkulturatif dimaksudkan agar dapat membangun organisasi Gereja yang lebih akuntabel dengan menerima nilai-nilai akuntabilitas dalam budaya lokal menjadi bagian dari konsep akuntabilitas Gereja dalam kesatuan dengan Gereja universal. Untuk itu peneliti mencoba mengekstensi metode etnografi kritis dan proses inkulturasi dalam organisasi Gereja



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Katolik menjadi sebuah metode yang disebut metode etnografi kritis inkulturatif⁵ (*acculturative critical ethnographic method*). Metode ini dapat diangkat menjadi salah satu metode ilmiah pada tataran paradigma kritis mengingat metode ini mempunyai tahapan yang jelas yaitu terjemahan dan asimilasi sebelum sampai pada tujuan yaitu transformasi.

Tahap pertama, yaitu terjemahan ditandai dengan adanya kontak suatu budaya dengan budaya lain atau suatu organisasi dengan organisasi lain menuju proses akulturasi. Dalam proses akulturasi dilakukan indentifikasi nilai-nilai yang ada pada masing-masing budaya atau organisasi yang dapat berbeda dalam memaknai suatu domain yang sama atau sebaliknya dapat ditemukan persamaan-persamaan.

Tahap kedua, yaitu asimilasi. Pada tahap ini, inkulturasi baru dimulai dan sekaligus sebagai tahap kritis. Dalam tahap ini suatu organisasi yang masuk semakin mengasimilasikan diri pada budaya setempat yang kemudian mengambil alih nilai-nilai budaya setempat melalui tiga proses yaitu: proses pemurnian manifestasi dari nilai-nilai tersebut, menerima yang baik yang telah dimurnikan, dan selanjutnya memberi makna baru kepada manifestasi dengan mengangkatnya ke dalam nilai yang diharapkan.

Tahap ketiga yaitu transformasi yaitu tahap implementasi permanen. Tahap ini akan sukses jika proses asimilasi berjalan dengan baik yang ditandai dengan munculnya sebuah komunitas yang mempunyai kekhasan dinamis, terus menerus berkembang, tidak hanya dalam pengungkapan eksternal melainkan juga pada refleksi diri setiap anggotanya.

Situs Penelitian dalam Kerangka Budaya Lokal

Memilih Gereja Katolik di Tana Toraja sebagai situs penelitian karena Tana Toraja mempunyai praktik budaya yang terkenal dan tetap lestari meskipun sudah tersentuh oleh peradaban lain dengan masuknya agama Kristen selama kurang lebih seratus tahun yang lalu. Kehadiran Gereja Katolik di Tana Toraja ternyata tidak mematikan budaya lokal tetapi budaya lokal tetap hidup berdampingan dengan iman kristiani. Dengan demikian menarik untuk mengungkap budaya Toraja dalam

⁵ Berasal dari kata inkulturasi yang berarti usaha suatu agama untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat (Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru Terbitan PT. Media Pustaka Phoenix tahun 2009). Inkulturatif mempunyai kesamaan makna dengan akulturatif (*acculturate*) yaitu proses pembudayaan namun dalam penelitian ini digunakan kata inkulturatif yang lebih dipahami dalam organisasi Gereja Katolik.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

membangun tata kelola kemasyarakatan dalam hubungan dengan yang transenden, sesama manusia dan alam semesta yang juga menjadi inti dari akuntabilitas suatu masyarakat.

Hubungan yang transenden tersebut dalam budaya asli Toraja berkembang mitos penciptaan kosmos dan manusia yang mengungkapkan suatu pemahaman bahwa manusia lahir dari langit yaitu Sang Pencipta (Tuhan), hidup dalam naungan Sang Pencipta dengan menjalankan segala *aluk sola pemali* (ASP). Ketika manusia meninggal akan kembali kepada Sang Pencipta (dewa langit) lewat ritual yang sempurna dan dengan posisi sebagai bagian dari Sang Pencipta, dapat membantu anak cucu yang di bumi dengan memberikan rejeki yang cukup yang disebut *Dalle'* (Kobong, 2008; 32).

Dasar kepercayaan tersebut menempatkan agama asli orang Toraja sebagai agama animisme yang bernama *Alukta*, yaitu dengan menyembah dewa-dewi dan menghormati leluhur mereka. Dalam agama *alukta* dijalankan *aluk* yang menjadi pengikat hubungan harmonis dengan Sang Pencipta, sesama dan alam yang mencerminkan akuntabilitas yang mendalam dari warga masyarakat. *Aluk* mengatur hubungan dengan Sang Pencipta dinyatakan dalam upacara pemujaan kepada Sang Pencipta dan penghormatan kepada leluhur dalam *aluk rambu solo'* (ARS) dan *aluk rambu tuka'* (ART). Dalam hubungan dengan sesama manusia, akuntabilitas diatur dalam *aluk mellolo tau*, hubungan dengan alam diatur dalam *aluk pare* dan *aluk banua* sedang akuntabilitas ekonomi dinyatakan dalam *aluk pasa'* (pasar). *Aluk-aluk* ini dilaksanakan disertai dengan ritus-ritus yang dilaksanakan sepanjang tahun. Meskipun bentuk-bentuk *aluk* terdiri dari beberapa rangkaian, namun tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. *Aluk-aluk* itu menjadi satu kesatuan untuk menyatakan akuntabilitas masyarakat Toraja kepada yang transenden, manusia dan alam (Kobong, 2008: 78).

Keenam *aluk* tersebut, *ARS* dan *ART* yang mengungkapkan nilai spiritual menjadikan kedua *aluk* tersebut sangat dominan dilaksanakan oleh masyarakat Toraja dan mewarnai kehidupan komunitas masyarakat Toraja. Dua *aluk* ini selanjutnya menjadi bagian dari budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang ingin mendalami kehidupan religius dan kekerabatan masyarakat Toraja.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

a. Aluk Rambu Solo

Aluk rambu solo secara harafiah mempunyai makna ketentuan-ketentuan atau aturan untuk upacara yang dilakukan dengan asap yang menurun yang merupakan ritus-ritus persembahan untuk orang mati. Asap menurun diakronimkan juga dengan pergerakan matahari yaitu ketika matahari bergerak ke sebelah barat yakni di atas jam 12.00. Dengan pelaksanaan setelah matahari menuju ke barat, maka upacara ini juga disebut *aluk rampe matampu* yaitu ritus di sebelah barat.

Pelaksanaan *aluk* dipusatkan pada setiap rumah *tongkonan* dengan faham bahwa *tongkonan* adalah tempat yang menjadi pemersatu keluarga. Posisi *tongkonan* juga dipengaruhi oleh pelaksanaan *aluk*. Pelaksanaan *aluk rambu solo* di sebelah barat dan *rambu tuka* di sebelah timur, mengharuskan rumah *tongkonan* menghadap utara selatan, sehingga kedua sisinya dapat digunakan untuk upacara *aluk*.

Pelaksanaan *ARS* kemudian menjadi pusat dan konsentrasi dari nilai kehidupan sesuai dengan mitologi penciptaan yang dinyatakan dalam agama *alukta* bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini adalah kembali kepada kehidupan langit yaitu kembali kepada Sang Pencipta, maka untuk sampai ke sana harus dijamin oleh ritus-ritus. Ritus-ritus yang harus dijalankan mulai dari kelahiran, menjalani hidup di dunia dan puncaknya pada saat kematian. Ritus *ARS* menutup kehidupan di bumi kemudian yang meninggal kembali ke dalam kehidupan semula.

Kobong (2008: 51) menyatakan bahwa ritus kematian sebagai penutup masa hidup di dunia seakan merupakan antisipasi kehidupan yang akan datang, sehingga wajarlah kalau prestise keluarga dianggap menjadi taruhannya. Lebih lanjut Kobong mengatakan *ARS* tidak hanya mengungkapkan rasa persekutuan (kebersamaan) dan kasih terhadap yang meninggal, tetapi juga menjadi proyeksi kehidupan yang baik di seberang sana serta relasi persekutuan antara orang-orang yang hidup dan yang mati tetap berlaku. Semakin baik kehidupan leluhur di sana, akan semakin banyak pula berkat yang dapat diperoleh bagi keluarga yang masih hidup di dunia.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

b. Aluk Rambu Tuka'

Berbeda dengan *ARS*, *aluk rambu tuka'* (*ART*) merupakan upacara atau ritus yang dilakukan untuk memohon berkat kepada para dewa dan leluhur yang didewakan. Disebut *rambu tuka'* artinya asap yang membumbung ke atas ke langit sebelum matahari mencapai puncaknya yaitu jam 12.00. Jadi upacara *ART* hanya bisa dilakukan sebelum jam 12.00. *ART* juga disebut *aluk rampe matallo* artinya ritus yang hanya diselenggarakan di sebelah timur dari rumah *tongkonan*. Makna dari ritus *ART* adalah memohon berkat dan segala kebutuhan hidup di dunia. *Aluk rambu tuka'* merupakan *aluk* yang paling banyak dilakukan sejak manusia lahir, berkeluarga dan menjalani hidup sebelum kematian. Wujud dari *aluk rambu tuka'* dapat berupa permohonan agar berhasil melaksanakan suatu kegiatan dan wujud yang kedua adalah rasa syukur atas berkat dan keberhasilan yang diperoleh keluarga.

Aluk rambu tuka' yang lain yang cukup mendapat perhatian dalam upacara kegembiraan adalah *aluk banua*. *Aluk banua* adalah *aluk* untuk proses pembangunan dan renovasi rumah adat yang menjadi *tongkonan*. Ritus ini menurut Kobong (2008; 59) mempunyai dua belas tahapan yang dimulai dari persiapan sebelum membangun dan setelah bangunan *tongkonan* selesai. Ritus-ritus itu dilakukan untuk menghindarkan mala petaka bagi proses pembangunan dan memberikan berkat bagi para anggota keluarga (*toma'rapu*) dari *tongkonan* yang bersangkutan.

Tongkonan kemudian menjadi pusat budaya masyarakat Toraja dalam menjalankan aktivitas manusia sejak lahir sampai mati. Di samping itu *tongkonan* juga menjadi satu kesatuan rumpun keluarga yang mengikat tali persaudaraan di antara para anggotanya yang disebut *toma'rapu*. Kedua fungsi ini menempatkan *tongkonan* sebagai pusat ritus dan pusat tata kelola kekerabatan suatu kelompok masyarakat.

Latar belakang budaya tersebut di atas menjadi dasar bagi peneliti memilih salah satu paroki Gereja Katolik yang hidup dalam budaya Toraja sebagai obyek penelitian. Paroki Makale dipilih dengan pertimbangan bahwa paroki tersebut telah masuk kategori paroki mandiri dan mempunyai karakteristik sebagai paroki tertua di Tana Toraja serta menjadi pusat kevikepan Tana Toraja. Sebagai pusat Gereja Katolik di Tana Toraja, peneliti dapat mengungkap praktik akuntabilitas Gereja Katolik yang dibalut oleh budaya lokal.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 www.sna14aceh.com

Di bawah paroki Makale peneliti memilih tiga stasi yaitu stasi Santung, stasi Tampo dan stasi Tobo'ne yang mewakili pembagian wilayah kerja dalam paroki Makale. Pemilihan ketiga stasi tersebut di atas selain faktor keterwakilan, peneliti juga mempertimbangkan karakteristik masing masing stasi yang dapat memberikan pemaknaan yang lebih mendalam untuk mengungkap praktik akuntabilitas Gereja Katolik pada tingkat stasi. Karakteristik tersebut ialah aspek historis, aspek tata kelola dan usia stasi.

Menetapkan Informan Kunci

Informan merupakan pembicara asli yang diminta oleh peneliti berbicara dalam bahasa dan dialeknya sendiri dan sering menjadi contoh berbicara oleh peneliti. Jumlah informan kunci dalam penelitian ini adalah enam belas orang yang menjadi wakil dari masing-masing organisasi obyek penelitian. Informan-informan tersebut nampak dalam Table 1

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No	Nama	Posisi dalam Organisasi	Nama Organisasi
1	Prof. Salombe	Budayawan Toraja	Perguruan Tinggi
2	Gerardus Sattu	Mantan Pengantar Gereja Stasi Santung	Stasi Santung
3	Indo Sulle	Umat	Stasi Santung
4	Lambertus Rerung	Tokoh umat dan Masyarakat Satung	Stasi Santung
5	Bartholomeus Lapu Rura	Ketua umat	Stasi Tampo
6	Petrus Pakombong	Ketua Umat	Stasi To'bo'ne
7	Lorensius D.L.	Pengantar	Stasi To'bo'ne
8	Yulius Kala' P.	Tokoh Umat paroki Makale	Paroki Makale
9	P.S. Andin	Ketua Dewan Keuangan Paroki Makale	Paroki Makale
10	Anselmus Batara	Ketua Dewan Pastoral Paroki Makale	Paroki Makale
11	Nathan Runtung	Pastor Paroki Makale	Paroki Makale
12.	Yans	Pastor Pembantu Paroki Makale	Paroki Makale
13	Frans Arring	Vikep Toraja	Keuskupan Agung Makassar
14	Ernesto Amigleo CiCM	Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Makassar	Keuskupan Agung Makassar
15	Albert Arina	Ekonom Keuskupan Agung Makassar	Keuskupan Agung Makassar
16	Marselinus Asri	Konsultan Akuntansi Keuskupan Agung Makassar	Keuskupan Agung Makassar



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Dari tabel di atas, informan kunci adalah tokoh umat dan mereka yang duduk dalam struktur organisasi Gereja Katolik pada level stasi, paroki dan keuskupan. Penetapan informan kunci dilakukan peneliti setelah berdiskusi dengan vikjen, pastor paroki dan ketua dewan paroki yang mengenal dengan baik lokasi penelitian.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan hasil catatan etnografi yang telah dibuat sebelumnya. Tahapan analisis data meliputi deskripsi temuan, pemaknaan dan rekonstruksi.

a. Pemaknaan

Tahapan selanjutnya dalam analisis data ialah menemukan tema-tema yang menjadi fokus analisis. Tema-tema tersebut dielaborasi lebih lanjut guna mendapatkan pemaknaan akuntabilitas pada dimensi-dimensi utama yang ada pada masing-masing tingkatan organisasi Gereja Katolik. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi spiritual, dimensi kepemimpinan dan dimensi keuangan organisasi Gereja. Pemaknaan ini menjelaskan unsur-unsur yang mendasar yang dimiliki dan mekanisme yang dilaksanakan dalam praktik akuntabilitas organisasi Gereja.

b. Rekonstruksi

Berdasarkan hasil pemaknaan, maka analisis selanjutnya adalah rekonstruksi inkulturatif konsep akuntabilitas dalam kerangka budaya lokal sebagai langkah awal dari proses inkulturasi yaitu terjemahan. Tahap terjemahan dilakukan dengan mencari kesamaan nilai-nilai dari dua budaya atau organisasi untuk disandingkan menjadi sebuah konsep baru. Dalam konteks penelitian ini, konsep baru tersebut kemudian menjadi konsep akuntabilitas inkulturatif organisasi Gereja yang dapat ditingkatkan pada tahap selanjutnya dalam proses inkulturasi yaitu asimilasi dan transformasi.

Berdasarkan tahapan tersebut di atas, maka kerangka analisis yang dilakukan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka



Analisis

2. HASIL PEMAKNAAN AKUNTABILITAS DALAM ORGANISASI GEREJA.

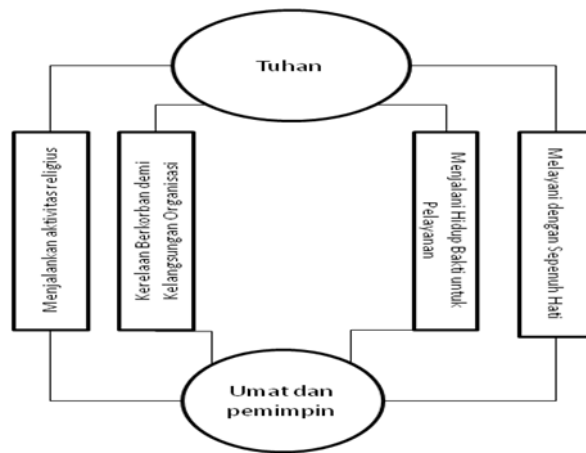
Hasil deskripsi dan pemaknaan akuntabilitas dalam Gereja Katolik memberikan gambaran bahwa praktik akuntabilitas yang ada dalam organisasi Gereja mempunyai tiga dimensi utama yaitu dimensi spiritual, dimensi kepemimpinan dan dimensi keuangan. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi inkulturatif yang menjadi fokus dalam bab ini. Bab ini diawali dengan intisari hasil deskripsi dan pemaknaan masing-masing dimensi akuntabilitas yang dilanjutkan dengan rekonstruksi inkulturatif nilai-nilai budaya lokal.

Makna Akuntabilitas Spiritual

Akuntabilitas spiritual diungkapkan dalam organisasi Gereja akuntabilitas yang menempatkan setiap individu sebagai anggota organisasi melalui rahmat sakramen pembaptisan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengagumi tokoh tersebut. Keyakinan ini menggerakkan setiap individu baik sebagai umat maupun sebagai pemimpin organisasi Gereja untuk semakin mendekati diri pada Tuhan dengan cinta yang tulus. Hal itu diungkapkan lewat kehadiran mereka dalam melakukan ibadah dan memberikan persembahan sebagai bukti tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan ibadah dan kelangsungan hidup para pemimpin Gereja. Pada sisi lain sebagian anggota Gereja mengungkapkan akuntabilitas spiritualnya dengan memilih hidup bakti yang secara khusus

mendekatkan diri pada Sang Kristus. Gaya hidup yang dihayati mereka adalah hidup miskin dalam pelayanan, hidup taat kepada pemimpin Gereja dan hidup tidak kawin serta mengedepankan unsur pelayanan dan kasih dalam setiap karya mereka baik di tengah umat maupun di tengah masyarakat. Hal itu menjadi wujud dari misi pelayanan Kristus yang utama yaitu datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bentuk akuntabilitas tersebut dinyatakan dalam bentuk model pada Gambar 6.

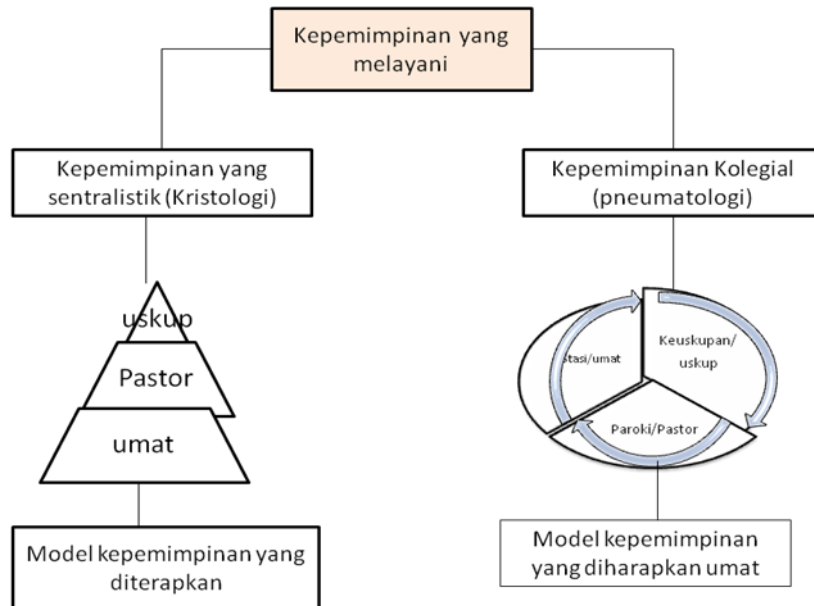
Gambar 6: Model Akuntabilitas Spiritual dalam Organisasi Gereja Katolik



Makna Akuntabilitas Kepemimpinan

Sementara itu pada akuntabilitas kepemimpinan dalam Gereja Katolik, dijumpai model kepemimpinan yang berusaha mengedepankan unsur pelayanan yang menjadi perwujudan dari model kepemimpinan Sang Kristus tokoh sentral dalam Gereja, namun disisi lain ada paradoks yang ambivalen dalam pelaksanaan kepemimpinan.

Gambar 7: Model Akuntabilitas Kepemimpinan dalam Organisasi Gereja Katolik



Paradoks yang dimaksud ialah di satu sisi pemimpin cenderung lebih mengamankan dimensi Kristologi yang menempatkan pimpinan Gereja sebagai sentral dan di lain sisi mengabaikan dimensi pneumatologi yang mengedepankan unsur kolegialitas dan keterlibatan umat yang justru diharapkan oleh umat dan *stakeholder* lainnya untuk dijalankan. Bentuk akuntabilitas kepemimpinan tersebut dinyatakan dalam model Gambar 7.

Makna Akuntabilitas Keuangan

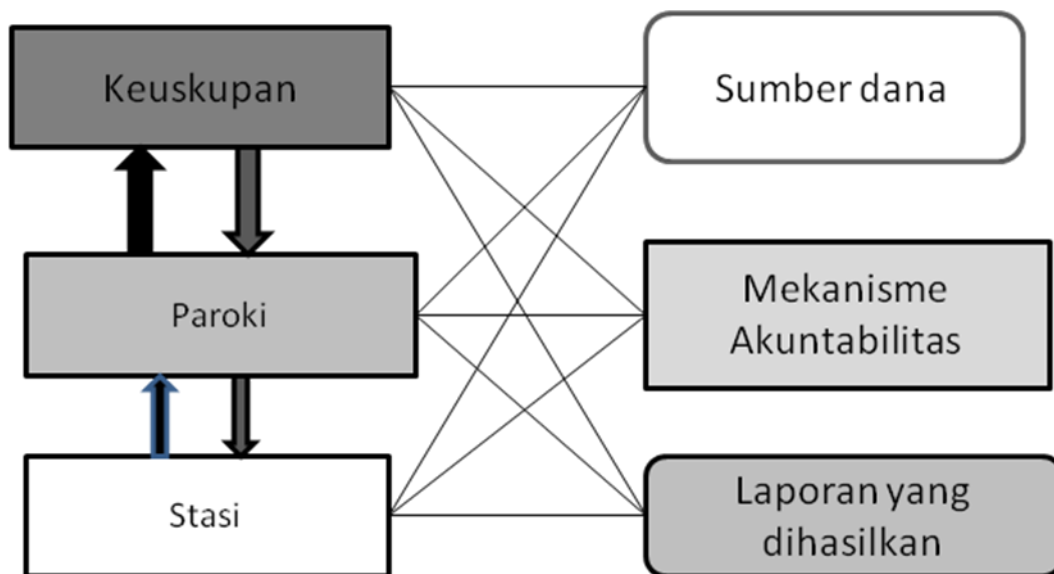
Makna akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas keuangan. Praktik yang dilaksanakan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan organisasi dalam keuskupan. Setiap tingkatan organisasi menunjukkan posisi sebagai agen bagi tingkatan di atasnya dan menjadi prinsipal bagi tingkatan di bawahnya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang ada pada masing-masing tingkatan organisasi.

Pada tingkat stasi, stasi menjadi agen bagi paroki dan sebaliknya paroki menjadi prinsipal bagi stasi. Dana yang dikelola meliputi dana stasi dan dana pembangunan. Mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut telah dijalankan dengan baik yaitu membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan kepada umat pada setiap hari Minggu dan disampaikan kepada pastor paroki sebagai prinsipal pada setiap bulan.

Dalam konteks organisasi paroki, paroki menjadi agen bagi keuskupan dan keuskupan menjadi prinsipal bagi paroki. Praktik akuntabilitas keuangan yang dijalankan pada tingkat paroki belum optimal dan cenderung dijalankan setengah hati. Praktik demikian muncul karena ditopang oleh aturan kanon yang menempatkan pemimpin Gereja sebagai sentral sehingga mendorong para pastor cenderung bertindak sentralistik dan otoriter. Dana yang dikelola organisasi paroki meliputi dana kolekte, dana pembangunan dan dana gembala, namun laporan pertanggungjawaban dana tersebut belum disampaikan kepada prinsipal dan *stakeholder*.

Kondisi yang sama pada organisasi keuskupan, praktik akuntabilitas akuntansi dan keuangan juga belum memadai. Meskipun organisasi keuskupan telah mulai mencoba menyusun laporan keuangan setiap tahun, namun publikasinya masih sangat terbatas sehingga pihak *stakeholder* tidak puas dengan akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan. Di samping itu praktik akuntansi yang dilaksanakan juga belum mencerminkan internal control memadai karena tidak ada pemisahan fungsi-fungsi, sehingga ekonom mempunyai kewenangan yang terlalu besar tanpa diimbangi pengawasan dari dewan keuangan keuskupan. Akuntabilitas keuangan tersebut dinyatakan dalam model seperti pada Gambar 8.

Gambar 8: Model Akuntabilitas Keuangan Gereja pada Masing-Masing Tingkatan Organisasi Gereja Katolik



Hubungan antar Dimensi Akuntabilitas

Intisari hasil deskripsi dan pemaknaan tersebut di atas dinyatakan dalam matriks yang menggambarkan pelaksanaan akuntabilitas pada masing-masing dimensi dan tingkatan organisasi Gereja seperti pada Tabel 3. Dimensi spiritual yang menekankan pada pelaksanaan ibadah dan pengungkapan cinta kepada Tuhan melalui hidup bakti dan pelayanan kepada sesama, sedang dimensi kepemimpinan menempatkan organisasi Gereja pada dominasi para pemimpin yang menciptakan bentuk kepemimpinan yang sentralistik. Bentuk kepemimpinan yang sentralistik tersebut kemudian mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban dimensi keuangan yang cenderung belum dijalankan secara baik.

Tabel 3. Maktriks Praktik akuntabilitas pada Organisasi Gereja

Tingkat organisasi Dimensi Akuntabilitas	Stasi	Paroki	Keuskupan
Akuntabilitas spiritual	Ibadah, Pelayanan	Hidup Bakti, Pelayanan	Hidup Bakti, Pelayanan
Akuntabilitas kepemimpinan	Kolegional	Sentralistik	Semi Sentralistik
Akuntabilitas keuangan: - Jumlah dan Jenis dana - Ketersediaan laporan dan publikasi - Keterlibatan Stakeholder	Dua Ada, sangat sederhana dan dipublikasi Tinggi	Empat Ada, tertutup dan tidak dipublikasi Sangat rendah	Lima Ada, semi tertutup, publikasi terbatas. Cukup

Dari intisari pemaknaan tersebut, maka hubungan ketiga dimensi dapat dipahami bahwa dimensi spiritual merupakan dimensi utama yang dinyatakan dalam bentuk kepercayaan dan cinta kepada Tuhan. Hal yang sama dikemukakan oleh Saerang (2001) dalam Gereja Pentakosta dan oleh Triyuwono (2004) sebagai *Amanah* dalam Islam. Kepercayaan ini menjadi wujud akuntabilitas kepada Tuhan dan para *stakeholder* yang dituangkan dalam Kitab Hukum Kanonik (Katolik), Konstitusi Gereja (Pentakosta) dan Syariah (Islam) sebagai dasar bertindak bagi setiap anggota.

Pada dimensi kepemimpinan, meskipun organisasi Gereja mengedepankan kepercayaan yang mengandung makna pertanggungjawaban kepada Tuhan dan menjiwai para pemimpin Gereja, namun kepercayaan sering ditafsirkan sebagai kewenangan yang

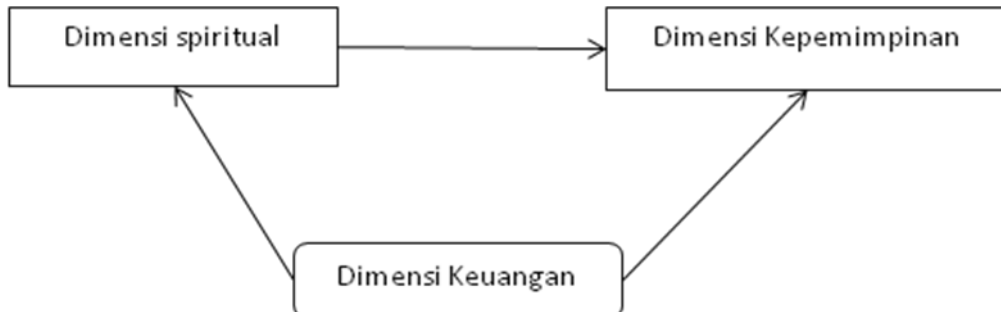


SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

melekat pada diri para pemimpin sebagai wakil Kristus di dunia (Kristologi). Hal demikian memberikan peluang bagi pelaksanaan kepemimpinan yang sentralistik yang berdampak pada pengelolaan keuangan yang kurang akuntabel dan transparan. Kondisi demikian mendorong para *stakeholder* menuntut pentingnya pertanggungjawaban keuangan yang formal yaitu penyajian laporan keuangan. Hal yang berbeda jika kepercayaan sungguh-sungguh dihayati oleh para pemimpin dan anggotanya lewat etika (moral) yang tinggi dan mematuhi norma-norma yang ada (Triyuwono, 2004), maka unsur formal penyajian laporan keuangan tidak diperlukan (Purnomo, 2004).

Karakteristik kepemimpinan yang sentralistik tersebut memberikan implikasi praktis pada penyajian laporan keuangan pada dimensi akuntabilitas keuangan organisasi Gereja. Penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa pada tingkat organisasi stasi dimana peran umat sangat tinggi, maka penyajian laporan keuangan telah dilaksanakan dengan baik kepada umat maupun kepada prinsipalnya. Sebaliknya pada tingkat paroki dan keuskupan dimana peran umat rendah dan peran pemimpin yang dominan, penyajian laporan keuangan belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan organisasi Gereja Pentakosta yang disebut organisasi Gereja lokal, penyajian informasi keuangan kepada umatnya tidak diperlukan karena adanya kepercayaan penuh dari umat kepada pemimpinnya. Sebaliknya pada tingkat regional dan pusat, penyajian laporan keuangan dipandang perlu dan telah berjalan dengan baik karena dana yang ada di tingkat regional berasal dari Gereja lokal dan dana yang ada di tingkat pusat berasal dari organisasi tingkat regional (Saerang, 2001). Perbedaan ini dapat terjadi sebagai wujud dari struktur organisasi yang hirarkis dalam Gereja Katolik yang menempatkan organisasi pada tingkat di atasnya sebagai prinsipal. Sebaliknya dalam Gereja Pentakosta dimana Gereja lokal lebih otonom dan hubungan dengan organisasi pada tingkat regional dan pusat hanya sebatas asosiasi sehingga yang menjadi prinsipal adalah anggota dari setiap asosiasi.

Gambar 9: Hubungan Ketiga Dimensi Akuntabilitas dalam Organisasi Gereja



Realitas demikian juga dapat dipahami mengingat posisi dimensi keuangan dalam Gereja Katolik hanya menjadi pendukung kedua dimensi yang lain yaitu spiritual dan kepemimpinan. Seperti diungkapkan dalam KHK 222 tentang penggunaan harta benda Gerejawi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua aktivitas dalam dimensi spiritual dan kepemimpinan. Hubungan ketiga dimensi akuntabilitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 9 di atas dimana dimensi spiritual sebagai dimensi utama dalam akuntabilitas organisasi Gereja menjiwai para pemimpin organisasi Gereja dan umatnya dalam bertindak. Sedang posisi akuntabilitas dimensi keuangan sebagai pendukung pelaksanaan ibadah pada dimensi spiritual dan kelanjutan (sustensi) para pemimpin Gereja pada dimensi kepemimpinan. Namun demikian dalam konteks organisasi secara umum baik organisasi privat maupun organisasi publik, dimensi akuntabilitas keuangan telah menjadi unsur utama yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga harus menjadi perhatian organisasi Gereja agar tetap mendapat kepercayaan dari para *stakeholder*.

Pentingnya Gereja memperhatikan dimensi akuntabilitas keuangan mengingat hasil pemaknaan dimensi keuangan yang meliputi sumber dana, mekanisme pertanggungjawaban dan laporan yang dihasilkan masih jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan yang sehat. Seperti diungkapkan oleh para *stakeholder* khususnya pada tingkat organisasi paroki dan keuskupan.

3. REKONSRTUKSI INKULTURATIF AKUNTABILITAS

Berdasarkan hasil pemaknaan akuntabilitas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka organisasi Gereja mempunyai tiga dimensi akuntabilitas utama yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Ketiga dimensi tersebut mempunyai kesejajaran dengan nilai-nilai akuntabilitas dalam budaya lokal masyarakat Toraja



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

khususnya dalam organisasi *tongkonan*. Organisasi *tongkonan* sebagai pusat kegiatan seluruh anggota keluarga (*toma'rapu*) menempatkan *tongkonan* sebagai pusat ritus, pusat kepemimpinan dan pusat pertanggungjawaban dalam membina relasi dengan Sang Pencipta, sesama dan alam semesta. Kesejajaran akuntabilitas tersebut memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi inkulturatif untuk membangun akuntabilitas organisasi Gereja ke arah yang lebih baik dan menghindari pemusnahan budaya lokal dengan masuknya Gereja Katolik di Tana Toraja.

Rekonstruksi diawali dengan pemahaman akuntabilitas dalam perspektif fungsi dan peran *tongkonan* dalam budaya Toraja, dilanjutkan dengan rekonstruksi akuntabilitas spiritual, rekonstruksi akuntabilitas kepemimpinan, rekonstruksi akuntabilitas keuangan dan diakhiri dengan model rekonstruksi inkulturatif.

Akuntabilitas dalam Perspektif Fungsi dan Penan *Tongkonan*

Makna kata *tongkonan* berasal dari suku kata *tongkon* yang artinya duduk, yang kemudian makna tersebut berkembang menjadi pernyataan ikut belasungkawa dengan kehadiran seseorang di tempat orang berduka. Selain itu, *tongkonan* juga berarti rumah yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan religius dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan ritus-ritus baik ritus *aluk rambu solo' (ARS)* maupun ritus *aluk rambu tuka' (ART)*. Seperti dijelaskan oleh salah seorang budayawan Toraja (M1)⁶:

“Kata *tongkonan* berasal dari istilah "*tongkon*" yang berarti duduk. Dahulu rumah ini merupakan pusat pemerintahan, kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Tana Toraja. Rumah ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Tana Toraja. Dengan sifatnya yang demikian, *tongkonan* mempunyai beberapa fungsi, antara lain: pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pembinaan peraturan keluarga, kegotongroyongan, pusat dinamisor, motivator dan stabilisator sosial.”

Sebagai pusat religius dan kemasyarakatan, maka *tongkonan* menjadi simbol yang sangat berarti bagi masyarakat Toraja. Setiap warga masyarakat terikat dengan sebuah *tongkonan* melalui silsilah dirinya sampai pada orang yang pertama mendirikan suatu *tongkonan*.

Tongkonan dalam masyarakat Toraja mempunyai beberapa jenis dan tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: *Tongkonan Layuk* atau *Tongkonan Pesio' Aluk*, yaitu *Tongkonan* tempat menciptakan dan menyusun aturan-aturan sosial keagamaan.

⁶ Manuskrips no 1



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Tongkonan Pekaindoran atau *Pekamberan* atau *tongkonan Kaparenggesan* yaitu *tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat pengurus atau pengatur pemerintahan adat berdasarkan aturan dari *tongkonan Pesio' Aluk*. *Tongkonan Batu A'riri* yang berfungsi sebagai *tongkonan* penunjang. Meskipun terdiri dari beberapa jenis, namun mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat pelaksanaan ritus (*aluk*), pusat kepemimpinan dan pusat pertanggung-jawaban.

Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Spiritual

Akuntabilitas spiritual dari hasil pemaknaan pada bab 6 menempatkan umat sebagai agen dan Tuhan sebagai prinsipal. Aktivitas umat dilakukan dalam komunitas yang disebut Gereja melalui empat aktivitas utama yaitu melakukan ibadah, memberikan persembahan, menjalani hidup bakti dan melayani dengan tulus hati. Aktivitas tersebut merupakan ungkapan iman umat yang mempunyai kesetaraan dengan akuntabilitas spiritual yang dijalankan pada sebuah komunitas *tongkonan*. Akuntabilitas spiritual *tongkonan* dilaksanakan dalam bentuk ritus *aluk* (*rambu solo' dan rambu tuka'*) yang juga bertujuan untuk menghantar manusia kepada Sang pencipta (*Puang Matua*).

Dengan kesejajaran makna akuntabilitas tersebut, maka rekonstruksi inkulturatif dapat dilakukan dengan menempatkan Gereja sebagai *tongkonan* Kristus. Sebuah *tongkonan* yang menjalankan keempat aktivitas utama dalam akuntabilitas spiritual melalui pelaksanaan ritus (*aluk*) dalam budaya lokal yang telah disucikan menjadi *aluk* kristiani. Rekonstruksi demikian dapat meningkatkan spiritualitas setiap umat tanpa harus meninggalkan budaya mereka sebagai anggota *tongkonan* Kristus yaitu Gereja Katolik.

Beberapa bentuk upacara yang dapat disucikan antara lain: a) Upacara orang mati (*rambu solo'*) yang dimaksudkan untuk mengantar orang yang meninggal ke alam arwah (*puya*), disucikan menjadi upacara untuk mendoakan agar orang yang meninggal agar dapat memperoleh keselamatan kekal dalam Kerajaan Allah, b). Memotong hewan kurban sebagai kendaraan menuju *puya*, disucikan menjadi jamuan untuk kerabat yang datang di upacara duka. Rekonstruksi inkulturatif (pemaknaan baru) upacara adat tersebut telah digariskan oleh Gereja Kristen Toraja dan Gereja Katolik yang pada intinya Gereja mengakomodir upacara adat namun harus disucikan dalam iman kristiani. Dalam buku Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (1992 ; 139) dirumuskan:



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

"Pada upacara orang mati boleh memotong kerbau atau babi; mengangkat ratapan dan nyanyian tidak dilarang, tetapi seandainya ada hewan yang dipotong, tidak boleh diadakan kurban kepada jiwa-jiwa yang sudah mati: Saudara tidak boleh mempunyai pikiran bahwa orang yang mati membawa serta binatang yang dipotong itu ke puya (negeri arwah) atau ke surga; binatang tidak mempunyai jiwa kekal. Jadi yang dipotong itu bukan bekal atau milik dari orang yang meninggal itu melainkan hanya disuguhkan sebagai hidangan makanan kepada para tamu dan keluarga."

Pemurnian upacara adat juga dilakukan dalam Gereja Katolik seperti dikutip dari Van Schie (2000: 193):

"Dalam rapat tanggal 30 Maret 1955 diputuskan bahwa pesta pemakaman orang Katolik dapat diizinkan asal tidak disertai dengan persembahan kepada dewa. Ma'Badong dilarang karena dianggap memberi kesempatan melakukan dosa."

Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Kepemimpinan

Akuntabilitas organisasi Gereja yang kedua adalah akuntabilitas kepemimpinan. Pemaknaan Akuntabilitas ini telah dibahas dalam bab 7 yang intinya menempatkan akuntabilitas kepemimpinan dalam Gereja sebagai akuntabilitas pelayan (*stewardship*). Namun bentuk kepemimpinan ini dijalankan dengan lebih menekankan pada dimensi kristologis yang cenderung sentralistik dan kurang mengakomodir dimensi pneumatologi yang lebih mengutamakan keterlibatan para *stakeholder* secara kolejial.

Dengan dasar kepemimpinan yang sama yaitu melayani, maka rekonstruksi akuntabilitas kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai akuntabilitas kepemimpinan *panglaa tondok*. Kepemimpinan *panglaa tondok* adalah kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota (*toma'rapu*) dan ditopang oleh kepribadian seorang pemimpin yang bijaksana dan berani dalam mengambil suatu keputusan. Rekonstruksi tersebut dapat mengakomodir dua bentuk kepemimpinan dalam organisasi Gereja yaitu kristologi dan pneumatologi.

Seorang *pemimpin Panglaa Tondok* dalam menjalankan tugasnya senantiasa melibatkan seluruh komponen kekuatan dalam *tongkonan* dan mempunyai semboyan:

Misa' kada dipotuoPantan Kada dipomate
Sangkutu' banne Sangbuke amboran.

yang artinya satu kata satu tindakan menuju hidup, banyak kata banyak pendapat akan menuju kematian sehingga harus bersatu kompak satu gerak dan tindakan (Tulak, 2009). Di samping itu seorang pemimpin *tongkonan* harus memenuhi kriteria yang disebut *tallu bakana*. *Tallu bakana* artinya tiga unsur beban yang harus dipenuhi yaitu: *manarang na*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

kinaa (pintar dan bijak), *sugi na barani* (kaya dan berani) dan *bida* (menguasai Ilmu *tongkonan*) (Kobong 2008: 113).

Motto dan kriteria kepemimpinan *panglaa tondok* dalam organisasi tongkonan tersebut dapat ditransformasi menjadi motto dan kriteria kepemimpinan Gereja. Meskipun demikian kriteria yang ada tidak dapat dipaksakan mengingat panggilan menjadi pemimpin dalam Gereja adalah panggilan religius. Panggilan religius adalah panggilan yang dilandaskan pada ketertarikan seseorang akan pribadi Kristus dengan bersedia menjadi pelayannya dalam organisasi Gereja.

Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas yang ketiga dalam organisasi Gereja adalah akuntabilitas keuangan. Pemakaian akuntabilitas keuangan tersebut juga telah dibahas dalam bab 8 yang menempatkan dimensi keuangan sebagai dimensi pendukung terhadap dimensi spiritual dan kepemimpinan dalam wadah organisasi yang bersifat hirarkis. Setiap tingkatan dalam hirarki organisasi berperan sebagai agen untuk level di atasnya dan menjadi prinsipal untuk level di bawahnya, sehingga mekanisme pertanggung jawaban dan penyajian informasi keuangan belum dilaksanakan sepenuhnya.

Memahami pelaksanaan akuntabilitas keuangan dalam organisasi Gereja yang masih minim tersebut, maka rekonstruksi konsep akuntabilitas keuangan dapat dirumuskan sebagai akuntabilitas keuangan *kombongan* dan *karapasan*. Akuntabilitas yang dimaksud adalah suatu bentuk akuntabilitas keuangan yang melibatkan umat dalam penyusunan program kerja melalui *kombongan* dan menyajikan laporan keuangan guna menciptakan *karapasan* (keberterimaan) bagi para *stakeholder* Gereja.

Penyusunan program kerja lewat *kombongan* menurut Anselmus (M36⁷) pernah dicoba dilaksanakan dalam lingkungan paroki Makale, namun mentah kembali dengan adanya penggantian pemimpin Gereja yang mempunyai *style* kepemimpinan yang cenderung sentralistik. Apa yang diungkapkan Anselmus di atas sekaligus juga menunjukkan bahwa proses inkulturasi akuntabilitas keuangan dengan keterlibatan umat dalam menyusun program kerja dan anggaran tetap mendapat kendala jika sistem kepemimpinan dalam Gereja masih sentralistik.

⁷ Manuskrip no 36

Salah satu bentuk hasil *kombongan* yang dilakukan di suatu *tongkonangan* adalah rencana pembangunan atau renovasi rumah adat. Membangun atau merenovasi rumah adat *tongkonan* menjadi tanggung jawab semua rumpun keluarga yang disebut *pa'rapuan* dari *tongkonan* tersebut. Rencana pembangunan atau renovasi dibuat dan diputuskan bersama dengan pimpinan *tongkonan* dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan *pa'rapuan*. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang jumlah biaya dan membaginya kepada para perwakilan dari *toma'rapu*. Menurut Kobong (2008; 90):

“Dibandingkan pada saat penyelenggaraan ritus kematian, kesadaran akan persekutuan menampakkan diri lebih jelas lagi pada saat penahbisan sebuah *togkonan*. Pada ritus-ritus kematian tanggung jawab terletak pada pundak para *bati*⁸ artinya anak si mati, sedangkan tanggung jawab atas penahbisan sebuah *tongkonan* diemban oleh seluruh *pa'rapuan*.”

Keterlibatan anggota (*toma'rapu*) dalam sebuah *tongkonan* juga dapat terlihat pada upacara *mangrara* (pemberkatan) *tongkonan*. Keluarga yang hadir membawa identitas sebagai bagian keluarga dengan membawa babi besar yang diusung dalam *lettoan*⁹ dan di atasnya dicantumkan nama keluarga. Ungkapan persaudaraan tersebut diperkuat oleh salah seorang kerabat *tongkonan* yang menetap di Papua (M33)¹⁰. Dia mengatakan:

“Saya meskipun telah berada di Papua dan telah menetap di sana selama dua puluh tiga tahun, namun saya mengupayakan hadir dalam upacara *mangrara tongkonan* kami agar dapat bertemu kembali dengan sengenap *toma'rapu*. Saya bersama saudara-saudara saya juga membawa sebuah *lettoan*.”

Model Rekonstruksi Inkulturatif

Hasil rekonstruksi tersebut dirangkum dalam matriks pada Tabel 3 dan Gambar 10 sebagai model akuntabilitas Gereja Inkulturatif yang pada intinya memberikan pemaknaan akuntabilitas yang baru yang disebut akuntabilitas Gereja *tongkonan*. Akuntabilitas Gereja *tongkonan* adalah akuntabilitas yang mampu mentransformasi nilai-nilai budaya lokal pada organisasi *tongkonan* ke dalam organisasi Gereja agar Gereja katolik Toraja lebih akuntabel dan transparan.

Tabel 3: Maktrik Hasil Rekonstruksi Inkulturatif Konsep Akuntabilitas dalam Kerangka Fungsi *Tongkonan*

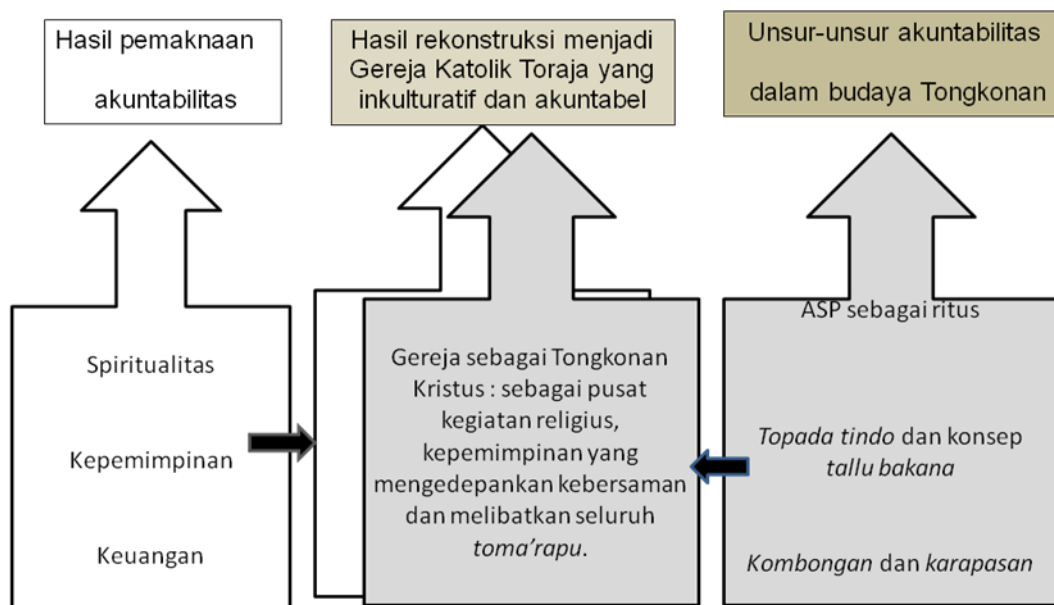
⁸ Bati' adalah keturunan dalam garis vertikal

⁹ Lettoan sejenis keranda yang dihias untuk mengusung babi dalam upacara *mangrara banua*

¹⁰ Manuskrip no 33

Tingkatan organisasi Gereja	Stasi	Paroki
Dimensi akuntabilitas		
Akuntabilitas spiritual	<i>Tongkonan Kristus</i>	<i>Tongkonan Kristus</i>
Akuntabilitas kepemimpinan	Umat sebagai <i>toma'rapu</i>	Pastor Sebagai <i>PanglaaTondok</i>
Akuntabilitas keuangan	<i>Kombongan dan Karapasan</i>	<i>Kombongan dan Karapasan</i>

Gambar 10 : Model Rekonstruksi Inkulturatif



Meskipun hasil rekonstruksi konsep akuntabilitas di atas dilakukan dalam kerangka budaya Toraja yang hanya menjadi salah satu wilayah dari keuskupan, namun nilai-nilai yang dibangun merupakan nilai-nilai universal, sehingga hasil rekonstruksi dapat diimplikasi pada tingkat keuskupan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai pada budaya lain.

Pelaksanaan inkulturatif juga harus dijalankan sesuai dengan tahapan yang benar agar tidak dilakukan secara absolut. Menurut Uskup (M3¹¹):

“...dibutuhkan dukungan teologis yang andal dalam terang tradisi Gereja semesta. Untuk menghasilkan refleksi teologis dibutuhkan data antropologis dan sosiologis setempat, dalam kerjasama khususnya dengan tokoh-tokoh dan para ahli adat setempat. Perlu jelas pula seberapa jauh nilai-nilai asli itu masih menjiwai hidup

¹¹ Manuskrip no 3



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

masyarakat setempat sekarang ini, bagaimana melestarikannya dan membuatnya tetap relevan di tengah arus perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.”

Hal demikian juga ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II bahwa, ada kecenderungan yang datang dari timur yang kurang memiliki keyakinan akan kebenaran, menyangkal ciri eksklusif kebenaran dan cenderung menganggap kebenaran itu mewujudkan secara sama dalam berbagai ajaran, walaupun ajaran yang satu saling bertentangan dengan yang lain (Cahyadi (2007: 119). Penegasan Paus tersebut menjadi peringatan bagi Gereja Asia yang cukup gencar melakukan inkulturasi nilai-nilai budaya lokal yang harus dipahami secara baik dalam konteks Gereja universal agar tidak menjadi inkulturasi sinkretisme yang berujung pada hilangnya identitas suatu organisasi keagamaan baik dalam konteks keyakinan maupun dalam aspek tata kelola organisasinya.

Hal demikian dapat terjadi jika tahapan inkulturasi tidak melalui kajian teologis, antropologis dan sosiologis yang mendalam. Seperti pemahaman seorang umat (M3)¹²:

“Anna susi te ladipogau’ lan kasalamaran, berarti la sule omoki laku aluk todolo. Belanna iatu ada’ dipogau’ lan aluk todolo ladipogau’ omo lan Gereja” (yang artinya kalau ini yang akan dilaksanakan dalam memperoleh keselamatan, berarti kita akan kembali ke agama asli (*alukta*). Karena tradisi dalam agama *alukta* akan dilaksanakan lagi dalam Gereja).

Pemahaman demikian mungkin keliruh karena kurangnya pengetahuan tentang inkulturasi budaya. Hal demikian juga menjadi bukti bahwa proses kehadiran Gereja sebelumnya kurang mengakomodir nilai-nilai yang baik dalam budaya setempat dan memberi vonis agama dan tradisi asli adalah kafir, sehingga harus ditinggalkan. Kekhawatiran tersebut harus dipahami agar Gereja tidak kehilangan identitas dan larut dalam hegemoni inkulturasi. Namun di sisi lain harus disadari bahwa budaya juga memegang peranan yang penting dan vital karena iman tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Budaya menjadi ruang yang vital dimana umat manusia berhadapan dengan Injil. Evangelisasi dan budaya secara kodrati saling berkaitan erat satu sama lain. Injil dan warta iman sendiri tidak identik atau bergantung kepada budaya tertentu, namun perwujudan injil dan iman, datangnya Kerajaan Allah tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan karena realisasi Kerajaan

¹² Manuskrip no 3



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Allah tidak terhindarkan dan senantiasa memakai unsur-unsur dari budaya umat manusia (Cahyadi, 2007).

Pentingnya budaya tetap eksis dalam Gereja juga didukung oleh pendapat dari salah seorang umat yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat sebagai *Panglao Tondok*(M3)¹³:

“ini adalah sesungguhnya yang kami harapkan. Bahwa Gereja tidak menjadi musuh bagi adat yang berada dalam masyarakat tetapi dapat mentolerir adat tersebut dalam kerangka keimanan yang sejati.”

Dengan demikian proses inkulturasi tersebut diharapkan dapat membangun akuntabilitas Gereja Katolik Toraja yang diterima baik oleh umat tanpa harus meninggalkan budaya mereka dan tetap dalam naungan Gereja Katolik yang kudus dan Apostolik.

4. KESIMPULAN

Hasil pemaknaan dari praktik akuntabilitas dalam organisasi Gereja berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibedakan dalam tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Ketiga kategori ini muncul dalam setiap jenjang organisasi baik pada stasi, paroki maupun keuskupan.

Makna Akuntabilitas Spiritual. Praktik akuntabilitas spiritual dalam Gereja stasi, dilakukan sepenuhnya oleh umat sebagai akar rumput Gereja. Umat melaksanakan kewajiban dalam bentuk kegiatan religius yang menjadi wujud akuntabilitas spiritual. Kegiatan tersebut antara lain mengikuti ibadah pada hari Minggu, mengikuti doa-doa keluarga dan memberikan persembahan kepada Gereja sebagai ungkapan keyakinannya. Selain itu sebagian umat baik pria maupun wanita juga mengungkapkan akuntabilitas spiritual mereka dengan memilih panggilan hidup bakti. Panggilan hidup bakti adalah pilihan untuk mengikuti Yesus lebih dekat dengan cara memilih hidup miskin, taat kepada atasan dan pemimpin Gereja serta hidup tidak menikah.

Makna Akuntabilitas Kepemimpinan. Sementara itu pada hasil pemaknaan akuntabilitas kepemimpinan dalam organisasi Gereja dijumpai model kepemimpinan yang berusaha mengedepankan unsur pelayanan yang menjadi perwujudan dari model kepemimpinan Sang Kristus sebagai tokoh sentral dalam Gereja. Namun di sisi lain ada paradoks yang ambivalen dalam pelaksanaan kepemimpinan. Paradoks yang dimaksud

¹³ Manuskrip no 3



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

ialah adanya kecenderungan pengelolaan organisasi yang sentralistik untuk mengamankan ajaran Kristologi dan mengabaikan dimensi pneumatologi yang mengedepankan unsur kolegialitas dan keterlibatan umat.

Makna Akuntabilitas Keuangan. Peneliti menemukan praktik akuntabilitas keuangan pada masing-masing tingkatan organisasi sebagai berikut:

- a. Pelaksana akuntabilitas dalam organisasi Gereja menempatkan setiap tingkatan sebagai agen bagi tingkatan lebih tinggi dan menjadi prinsipal bagi tingkatan yang lebih rendah.
- b. Pada tingkat stasi, stasi sebagai agen bagi paroki mengelola dua jenis dana yaitu dana stasi dan dana pembangunan. Pengelolaan dana stasi dan dana pembangunan telah dipertanggungjawabkan kepada umat secara transparan dengan mengumumkan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada setiap hari Minggu. Dana yang lain yaitu dana kolekte dan dana gembala diserahkan ke Paroki. Penyerahan dana tersebut mengakibatkan Gereja stasi mengalami kekurangan biaya operasional sehingga timbul praktik ketidakjujuran Gereja stasi dalam menyajikan laporan keuangan kepada paroki.
- c. Paroki sebagai perpanjangan tangan keuskupan(agen) dan menjadi penanggung jawab Gereja lokal(prinsipal) bagi stasi mengelola empat jenis dana yaitu dana kolekte, dana *lelang rambu tuka'* dan *rambu solo'*, dana gembala dan dana pembangunan. Proses pengelolaan dana paroki sepenuhnya menjadi kewenangan pastor paroki dan pastor paroki belum menyajikan laporan keuangan kepada prinsipal maupun kepada *stakeholder*. Fakta tersebut meneguhkan penelitian sebelumnya bahwa organisasi Gereja bersifat *expressive* dan cenderung menolak praktik akuntabilitas karena terikat dengan nilai yang telah lama dianut dan peran pemimpin yang sangat dominan.
- d. Pada tingkat keuskupan sebagai prinsipal bagi paroki dan agen bagi Gereja induk di Roma, mengelola lima jenis dana yaitu dana subsidi Roma, dana solidaritas paroki, dana *Mgr Lumanaw*, dana aksi puasa pembangunan dan dana hasil usaha. Keuskupan dalam mengelola keuangan telah menghasilkan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat kualitatif sebuah laporan keuangan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

karena tidak adanya pemisahan fungsi yang menyebabkan ekonom menjadi otorisator tunggal transaksi keuangan. Di samping itu fungsi pengawasan oleh dewan keuangan tidak optimal karena kedudukannya terbatas sebagai konsultor kepada Uskup.

Dari ketiga tingkatan hirarki Gereja dapat diidentifikasi bahwa praktik akuntabilitas keuangan di Gereja stasi lebih baik dibandingkan dengan praktik akuntabilitas di paroki dan keuskupan. Dengan demikian kelemahan pada akuntabilitas keuangan akan memberikan dampak pada akuntabilitas yang lain karena akuntabilitas keuangan menjadi pendukung bagi terlaksananya ibadah dan kelangsungan hidup para pemimpin Gereja.

Untuk membangun akuntabilitas yang lebih dekat dengan Gereja lokal maka peneliti mencoba merekonstruksi konsep akuntabilitas dalam bingkai inkulturasi nilai-nilai budaya lokal masyarakat Toraja. Rekonstruksi konsep yang dimaksudkan ialah akuntabilitas Gereja *tongkonan* (*tongkonan church accountability*) yaitu konsep yang menempatkan anggota (*toma'rapu*) terikat secara batin dan lahiriah untuk membangun Gereja dalam tiga dimensi utama yaitu dimensi spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Proses rekonstruksi inkulturatif fungsi *tongkonan* sebagai pusat ritus dapat meningkatkan penghayatan akuntabilitas pada dimensi spiritual dengan menempatkan Gereja sebagai *tongkonan* Kristus. *Tongkonan* Kristus mengandung makna bahwa setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menjadi anggota *tongkonan*. Pada dimensi akuntabilitas kepemimpinan, *tongkonan* sebagai pusat kepemimpinan dapat menjadi inspirasi para pemimpin Gereja untuk selalu mengedepankan kolegialitas dan profesionalisme dalam memimpin organisasi Gereja. Kepemimpinan yang kolegialitas dan profesionalisme dapat ditemukan dalam motto para pemimpin *topada tindo* dan kriteria kepemimpinan yang profesional dalam *tallu bakana*. Sedang pada dimensi akuntabilitas keuangan, organisasi, *tongkonan* sebagai pusat pertanggungjawaban selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan lewat budaya *kombongan* dan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban melalui budaya *karapasan*. Dengan demikian Gereja hendaknya mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan serta menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

segenap anggota (*toma'rapu*). Penerapan nilai tersebut diharapkan dapat menumbuhkan akuntabilitas keuangan yang lebih transparan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam membangun penelitian ini, peneliti sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain bangunan paradigma, proses penelitian dan analisis data sehingga hasil riset yang diperoleh belum optimal.

Keterbatasan Paradigma dan Metode. Penelitian ini tidak hanya menggunakan paradigma interpretif yang telah berhasil mendeskripsi dan memaknai praktik akuntabilitas dalam organisasi Gereja, namun peneliti juga mencoba memberikan analisis dan rekonstruksi yang menjadi domain paradigma kritis meskipun hasilnya belum mendalam. Dengan demikian metode etnografi yang digunakan tidak dapat dikategorikan sebagai etnografi murni tetapi juga menggunakan *etnografi kritis inkulturatif* yang relatif baru sehingga perlu kajian lebih mendalam dalam merekonstruksi konsep akuntabilitas.

Keterbatasan Analisis Data. Keterbatasan analisis data dialami peneliti ketika masuk dalam proses rekonstruksi karena data dari informan sangat terbatas, sehingga pada tahap analisis rekonstruksi peneliti lebih banyak menggunakan data hasil penelitian sebelumnya dan referensi sekunder yang seharusnya dikurangi. Hal itu terjadi karena proses inkulturasi masih tahap terjemahan dan belum sampai pada tahap transformasi.

Implikasi Hasil Penelitian

Meskipun dengan segala keterbatasan yang disebutkan di atas, namun dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa penelitian ini dapat memberikan implikasi pada perumusan konsep akuntabilitas, perbaikan praktik akuntabilitas dan penelitian lebih lanjut.

Implikasi pada Konsep Akuntabilitas. Penelitian ini berhasil merumuskan makna dan model akuntabilitas pada masing-masing dimensi yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Penelitian ini juga memperkuat hasil riset sebelumnya bahwa dalam organisasi keagamaan akuntabilitas yang dibangun tidak terlepas dari kepercayaan para pengikut dan pemimpinnya yang menjadi dasar dimensi akuntabilitas spiritual. Pada dimensi kepemimpinan, kehadiran aturan dan hirarki di satu sisi dapat menjadi kekuatan namun di sisi lain dapat menjadi dasar untuk terciptanya bentuk kepemimpinan yang sentralistik yang kurang menerima keterlibatan seluruh *stakeholder*



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

sebagai salah satu wujud akuntabilitas kepemimpinan. Penelitian ini juga menempatkan Gereja Katolik sebagai salah satu organisasi yang *expressive* yang cenderung menolak praktik akuntabilitas keuangan karena terikat dengan aturan dan kepentingan para pemimpinnya. Untuk membangun akuntabilitas organisasi Gereja khususnya dalam Gereja Lokal, maka peneliti merumuskan konsep akuntabilitas inkulturatif yang disebut akuntabilitas *tongkonan* Kristus yaitu konsep akuntabilitas yang menempatkan Gereja sebagai sebuah *tongkonan* yang mempunyai fungsi yang relevan dengan ketiga dimensi akuntabilitas yang ada.

Implikasi praktik pada Organisasi Keuskupan Agung Makassar (KAMS). Dengan potret diri tentang praktik akuntabilitas dalam organisasi KAMS, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi KAMS di masa akan datang untuk mendesign dan memetakan dimensi-dimensi akuntabilitas yang ada dalam organisasi Gereja sebagai unsur-unsur yang perlu mendapat perhatian baik oleh umat maupun para pemimpin Gereja. Harapan umat akan pentingnya kepemimpinan yang kolegial yang melibatkan umat sesuai konsep pneumatologi hendaknya mendapat perhatian para pemimpin Gereja. Beberapa praktik ketidakjujuran dan ketidaksetiaan pada akuntabilitas keuangan hendaknya dicari solusinya agar mereka tidak semakin larut dalam praktik yang tidak terpuji. Hasil rekonstruksi inkulturatif juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun Gereja Katolik Toraja yang berbudaya lokal dan lebih akuntabel kepada para *stakeholdernya*.

Implikasi pada Penelitian Lanjutan. Dengan adanya keterbatasan- keterbatasan dalam penelitian ini, maka dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan paradigma lain seperti paradigma kritis untuk mengkritisi praktik akuntabilitas dalam organisasi Gereja secara komprehensif dan konstruktif guna menghasilkan rekonstruksi yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan paradigma yang sama namun menggunakan metode analisis yang berbeda. Hasil penelitian ini juga merekomendasi metode etnografi kritis inkulturatif (*acculturative critical ethnographic method*) sebagai salah satu metode dalam paradigma kritis untuk melakukan suatu proses transformasi budaya mengingat metode inkulturasi mempunyai tahapan yang jelas dalam merekonstruksi nilai-nilai budaya lokal menjadi nilai universal.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

DAFTAR PUSTAKA

- Ada', J. 2009. Memahami dan Menjalankan Inkulturasi Secara Benar. *Makalah*. Seminar Inkulturasi Dalam Budaya Toraja. Rantepao
- Baker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Kanisius. Yogyakarta
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia. Surabaya
- Berry, A. J. 2005. Accountability and Control in a Cat's Cradle, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 18, No.2, pp. 255-297.
- Berg, B.L. 2004. *Qualitative Research Methods*. Pearson Education. Boston
- Binawan A.A.L. 2005. *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, Kanisius Yogyakarta
- Booth, P. 1991. "The Sacred and The Secular: The Variable Significance of Accounting in a Religious Organization" presented at *The Accounting and Finance Seminars*, Macquarie University, September, pp.1-48.
- Booth, P.1993. "Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda".
- Brown, L. D. and M. H. Moore. 2001. *Accountability, a Strategy, and International Non Government Organization*. Working Paper, Harvard University.
- Burrell, G. and Gareth M. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational analysis, Elements of the sociology of corporate life*. Athenaeum press. Newcastle
- Budiman. 1993. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Kanisius
- Campbell A. 1994. *Professionalism and Pastoral Care*. Kanisius (penerjemah). Profesionalisme dan Pendampingan Pastoral. Kanisius. Yogyakarta
- Chalmers A.F. 1983. *Apa Itu yang Dinamakan Ilmu: Suatu Penilaian tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya*. Hasta Mitra. Jakarta
- Coy, D. and M. Pratt. 1998. An Insight Into Accountability and Politics In Universitas; A Case Study. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol.11, No.5. Pp.540-561
- Dixon, Rob, J. Ritchie, and J. Siwale. 2006. Microfinance: Accountability from the Grassroots. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol.19, No.3. pp.405-427.
- Duncan, J.B. and D. L. Flesher. 2002. Does Your Church Have Appropriate Internal Control For Cash Receipts?, *National Public Accountant*, February, pp. 15-19.
- Duncan, J. B. and D. L. Flesher. 1999. Internal Control Systems In US Churches, An Examination of The Effects of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 12, No. 2, pp. 142-163.
- Ebrahim, A. 2003. Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs, *World Development*, vol.31 no.5. pp13-29.
- Fialka, J.J. 1995. Unholy Acts: Church Officials' Thefts Dismay Catholics', *Wall Street Journal*, 27 June, pp. B1-B2.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Fries, R. 2003. "The legal environmental of civil society", in Kaldor, M., Anheier, H. and Glasius, M. (Eds), *Global Civil Society 2003*, Oxford University Press, Oxford, pp. 221-38.
- Goddard, A. and M. J. Assad. 2006. Accounting and Navigating Legitimacy in Tanzanian NGO, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol 19 No. 3 pp 377-404
- Goddard, A. 2004. Budgetary Practices and accountability Habitus: A Grounded Theory. *Accounting, auditing, and Accountability Journal* Vol 17 no.4 pp 543-577
- Gray R., C. Day, D. Owen, R. Evans and S. Zadek. 1997. Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholder, Accountability, Audit, and Procedures, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 10, No.3. Pp. 325-364
- Gray, R., D. Owen and K. Maunders. 1988. Corporate Social Reporting, Emerging Trends in Accountability and Social Contract, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 1, No.1. Pp. 6-20.
- Gray, R. 2002. The Social Accounting Project and Accounting Organizations and Society: Privileging Engagement, Imaginings, New Accountings and Pragmatism Over Critique, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 27 No. 7, pp. 687-708.
- Gray, R., Jan B., and C. David. 2006. NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 19, No.31. Pp. 319-348.
- Harjosusanto Y. 2010. Perlunya Relasi untuk Bekerjasama. Himawan A.S.(penyunting). *Harapan dan Cinta dari Uskup untuk Imamnya*. Obor. Jakarta Hal 91-98
- Jacobs, K and S. Walker. 2000. Accounting and Accountability in the INOA Community. K.Jacobs@ed.ac.uk.
- Jensen, M. C. and W.H. Meckling.1976. Teory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost And Owenship Structure. *Jurnal of Financial Economics*, October, 1976, V.3 No.4, pp.305-360
- Keuskupan Agung Makassar, 2001. *Statuta Keuskupan Agung Makassar*. Keuskupan Agung Makassar, Makassar.
- Keuskupan Agung Makassar, 2004a *Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki* Keuskupan Agung Makassar, Makassar.
- Keuskupan Agung Makassar, 2004b. *Pedoman Dasar Dewan Keuangan Paroki* Keuskupan Agung Makassar, Makassar.
- Keuskupan Agung Makassar, 2005. *Pedoman Umum Pengelolaan Keunagan Gereja Lokal KAMS*. Keuskupan Agung Makassar, Makassar.
- Kiernan T. Mc (2010) Kasus Pelecehan seksual Para pastor di Irlandia Utara www.shabestan.net/id/pages/?cid=1314
- Kirchberger G. 1996. *Iman dan Transformasi Budaya*, Nusa Indah. Flores NTT
- Knight J. 1996. Injil, Gereja dan Kebudayaan: alasan dan Implikasi Teologis bagi Studi Antropologi. Kirchberger G.(editor). *Iman dan Transformasi Budaya*, Nusa Indah. Flores NTT Hal 37-48
-



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Kobong T. 2008. *Evangelium und Tongkonan. Eine Untersuchung uber die Begegnung zwischen Christlicher botscht und der Kultur der Toraja*. Kobong T.(penerjemah): Injil dan Tongkonan Inkarnasi, Kontekstualisasi, transformasi. BPK Gunung Mulia. Jakarta
- Kobong T. dkk. 1992. *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaan dengan Injil*. Institut Theologia Indonesia, Jakarta
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2005. *Tata Perayaan Ekaristi Buku Umat*, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Jakarta.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2008. *Dokumen Konsili Vatikan II*, Cetakan kesembilan, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta.
- Kristiyanto, E. 2004. *Reformasi dari Dalam: Sejarah Gereja Zaman Modern*. Kanisius, Yogyakarta
- Kuhn, T.S. 1962. *The Structure of Scientetific Revolution: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Rosda Karya, Bandung.
- Laughlin, R.C. 1988. Accounting in its Social Context: An Analysis of The Accounting System of The Church in England, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 1, No. 2, pp. 19-42.
- Laughlin, R.C. 1990. A Model of Financial Accountability and The Church of England, *Financial, Accountability & Management*, Vol. 6, No. 2, pp. 93-114.
- Lehman, G. 1999. Disclosing new world: a Role for social and Enviromental Accounting and Auditing, *Accounting Organizations and Society*, vol 24 No.3 pp.217-242.
- Lehman, G. 2005. A Critical Perspective on the Harmonisation of accounting in a Globalising world, *Critical perspective on Accounting* Vol 16 pp 975-992
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2006. *Alkitab Deutrokanonika*, Jakarta.
- Lightbody, M. 2000. Storing and Shielding: Financial Management Behaviour in a Church Organisation, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 13, No. 2, pp. 156-174.
- Lightbody, M. 2001. Accounting & Accountants in Church Organizations: A Critical Reflection, a paper prepared for *The Third Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*, Adelaide, 15-17 July.
- Lightbody, M. 2002. On Being a Financial Manager in a Church Organisation: Understanding the Experience”, presented at *Critical Perspectives on Accounting Conference*, Baruch College, City University New York, 25-27 April.
- Naif O. 2006. Cara Spesifik Berada dari Ada. Komisi Teologi Konfrensi Wali Gereja Indonesia. *Dialog Antara Iman Dan Budaya*. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta hal 15-36
- Nasr, S.H. 2005. *Antara Tuhan Manusia dan Alam: Jembatan Filosofis dan Religius Menuju Puncak Spiritual*, Penerbit IRCISOD. Yogyakarta
-



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- McClory R. 2010. *Power and the Papacy: the People and Politic Behnd the Doctrine of Infallibility*. Jhon Nurung (penterjemah). *Paus dan Kekuasaan Heboh doctrin infalibilitas dalam Perjalanan Sejarah Gereja serta Orang-orang dan Intrik Politik di Balikny*. Obor, Jakarta
- Muhajir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- O'Dwyer B. 2005. The Construction of a Social Account; a Case Study in an Overseas Aid Agency. *Accounting, Orgaanization, and Society*, 30, pp. 279-296.
- Oxford University Press.1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fifth Edition, New York
- Paredes J.C.R.G. 2008. *Panggilan Hidup dan Kharisma*. Bina Media Perintis. Medan
- Parker, L. and G. Gould .2000. *Changing Public Sector Accountability: Critiquing New Directions*. Blackwell Publisher.
- Purnomo, A.W.E. 2004. Sistem Pengendalian Internal dalam Gereja: Antara Kotolisme dan Budaya Jawa. *Tesis*. Universitas Brawijaya Malang
- Quack A. 1996. Inkulturasi: sebuah perspektif antropologis. Kirchberger G.(editor). *Iman dan Transformasi Budaya*, Nusa Indah. Flores NTT Hal 153-163
- Quack A. 1996. Relasi ambivalen Antara Karya Misi dan Antropologi: Kritik dan usul-saran. Kirchberger G.(editor). *Iman dan Transformasi Budaya*, Nusa Indah. Flores NTT Hal 37-48
- Rahardi F. 2007. *Menguak Rahasia Bisnis dalam Gereja*, Visimedia Jakarta
- Raharso A.C. 2005. *Partisipasi Umat dalam Pengelolaan Harta Benda Paroki*, Al.Andang L.Binawan (penyunting), Demokratisasi dalam Paroki, Kanisius, Yogyakarta.
- Randa F. 2008. Pengelolaan Aset dan Keuangan Gereja. *Hidup* No. 62 30 November 2008. Jakarta
- Rentschler, Ruth and B. Pooter. 1996. Accountability Versus Artistic Development; The Case for Non Profit Museum and Performing Arts Organizations. *Accounting, Auditing, and Accountbilty Journal*. Vol 9 No.5 pp. 100-113.
- Roberts, J. 1996. *From discipline to dialogue: individualizing and socializing forms of accountability*, in Munro, R. and Mouritsen, J. (Eds), *Accountability: Power, Ethos and the Technologies of Managing*, International Thomson Business Press, London.
- Roberts, J. and R. Scapens. 1985. Accounting systems and systems of accountability understanding accounting practices in their organisational context", *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 10 No. 4, pp. 443-56.
- Saerang, D.P.E, (2001) *Accountability and Accounting in a Religious Organization: An Interpretive Ethnographic Study The Pentacostal Church Of Indonesia* . Dissertation. Walonggong University.
- San S. 2010. Imam Rekan Uskup dalam Karya Pastoral. Himawan A.S.(penyunting). *Harapan dan Cinta dari Uskup untuk Imamnya*. Obor. Jakarta Hal 123-34



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Macmillan Education Australia PTY LTD. South Melborne.
- Sinclair, A. 1995. The Chameleon of Accountability; Forms and Discourses. *Accounting, Organization, and Society*. Pp. 219-237.
- Spradley J.P. 1997. *The Ethnographic Interview*. Elisabeth M.Z. (penterjemah) Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- Strauch A. 2008. *The New Testament Diacon*. Harrison C.E & Handoyo O.S. (Penerjemah). Diaken Dalam Gereja Penguasa Atau Pelayan? Andi Offset Yogyakarta.
- Sutrisnaatmaka A.M. 2010. Kerja sama Uskup dan Imam: meningkatkan Kinerja Pelayanan Pastoral bagi Umat. Himawan A.S.(penyunting). *Harapan dan Cinta dari Uskup untuk Imamnya*. Obor.Jakarta Hal 91-98
- Swanson, G and J. Gardner. 1988. Not-for-profit Accounting and auditing in the early eighteenth century: some archival evidence. *The accounting Review*, Vol.63 No.3:436-447
- Sweetser, T. 2005. *The Parish as Covenant A Call to Pastoral Partnership*. F.X Hadisumarta, O.Carm.(penerjemah). Paroki Sebagai Perjanjian Undangan Berpastoral Bersama Mitra. Dioma. Malang
- Timo, E. N. 2005. *Sidik Jari Allah Dalam Budaya*, Ledalero, Maumere.
- Tondowidjojo J. 1992. *Etnologi dan Pastoral Di Indonesia*. Nusa Indah Flores
- Tulak, D. 2010. *Kada Disedan Sarong Bisara Ditoke' Tambane Baka*. Sangayoko, Rantepao
- Unerman J. and B. O'Dwyer. 2006b. On James Bond and the Importance of NGO Accountability. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 19, No.3. Pp. 439-376
- Unerman J. and B. O'Dwyer. 2006a. Theorising Accountability for NGO Advocacy. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 19, No.3. Pp. 439-376.
- Whitehead J.D. 1994. *Leadership Ministry in Community*. Komisi Liturgi KWI (Penterjemah) Kepemimpinan dalam Jemaat. Kanisius. Jakarta.
- Van Schie G. 2000. *Gereja Katolik di Tana Toraja dan Luwu*. Obor Jakarta.
- Zietlow,J. 1989. Capital and Operating Budgeting Practices in Pure Nonprofit Organization. *Financial Accountability & management*. Vol.5 No.4: 219-232.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

DAFTAR PUSTAKA LAIN

Uskup Jerman Mengundurkan dari. Liputan 6 SCTV tgl 21 april 2010

Sejarah Gereja Katolik. [www: gereja.katolik.com](http://www.gereja.katolik.com)